

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance) harus merupakan komitmen yang kuat dari seluruh domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah berada pada posisi sentral dan penting perannya. Pemerintah Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan kinerja yang baik.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Mengingat tantangan yang dihadapi kedepan akan semakin berat dan kompleks, diperlukan interkoneksi peran dan fungsi ketiga unsur/domain tersebut dalam konsepsi manajemen strategik dan implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip; akuntabilitas(*accountability*), transparansi (*transparancy*), keterbukaan (*openness*), aturan hukum (*rule of law*), keadilan (*fairness*) dan partisipasi(*participation*). Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus segera direspon secara proaktif melalui penerapan manajemen perubahan yang visioner dan pembelajaran kolektif terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Semangat untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di dalam Undang-Undang tersebut terikat pada 7 (tujuh) asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan, yakni ***asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, orientasi pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas serta akuntabilitas.***

Analisis capaian kinerja/ permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan

dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 - 2023.

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan memedomani Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 94 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2019 - 2023 dengan menjabarkannya kedalam dokumen perencanaan SKPD dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 -2023 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dengan demikian Renstra ini menjadi dasar penyusunan usulan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya untuk sektor industri, dengan tetap memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik di lingkungan eksternal maupun internal.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, juga berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di sektor perindustrian dan perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk kurun waktu 2019 - 2023. Hal ini sesuai dengan amanat INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian komitmen dan konsistensi penyelenggara pemerintahan terhadap Renstra menjadi sangat penting untuk mengukur atau Tujuan akuntabilitas instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian Provinsi dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), dan Undang-

- | | | | |
|--------------|----|-------|------|
| Undang Nomor | 13 | Tahun | 1964 |
|--------------|----|-------|------|
- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13 Tambahan Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 5 Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 - 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023.

Maksud lain dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah untuk tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Sulawesi Selatan pada tahun 2023, khususnya sektor industri yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2023 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2019 – 2023, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Selatan.
2. Rujukan resmi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan.
3. Mempermudah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan
4. Menciptakan tata pemerintahan yang baik.
5. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
6. Acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama tahun 2019 - 2023.
7. Tolok ukur penilaian keberhasilan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program.
8. Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan ke dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka rumusan visi dan misi serta berbagai kebijakan teknis yang ditetapkan, dikaji lebih jauh tingkat relevansinya dengan aspirasi masyarakat serta kondisi daerah saat ini. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Dinas yang disusun keseluruhannya bermuara pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 - 2023. Untuk itu Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai berikut :

- BAB I.** Pendahuluan yang isinya Mengemukakan Tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- BAB II.** Gambaran Pelayanan SKPD yang isinya Mengemukakan Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Sumber Daya Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.
- BAB III.** Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang isinya Mengemukakan Tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV.** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB V.** Strategi dan Arah Kebijakan yang isinya Mengemukakan Tentang Rumusan Perencanaan Komprehensif Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Dalam Renstra 2018 - 2023.
- BAB VI** Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan yang isinya Mengemukakan Tentang Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.
- BAB VII** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang isinya Mengemukakan Tentang Memberikan Gambaran Indikator Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.
- BAB VIII** Penutup Kesimpulan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN**PROVINSI SULAWESI SELATAN****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dinas perindustrian provinsi sulawesi selatan**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana mana disebutkan dalam pasal 115 adalah sebagai berikut: Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Perindustrian dan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan dinas perindustrian mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian meliputi bidang industri kecil dan menengah, bidang industri tekstil aneka elektronika dan telematika, bidang industri logam mesin dan alat transportasi, bidang industri agro kimia dan hasil hutan, dan pelayanan teknis makanan minuman dan kemasan dan pelayanan teknis logam, tekstil dan alat mesin pertanian.
2. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang perindustrian meliputi bidang industri kecil dan menengah, bidang industri tekstil aneka elektronika dan telematika, bidang industri logam mesin dan alat transportasi, bidang industri agro kimia dan hasil hutan, dan pelayanan teknis makanan minuman dan kemasan dan pelayanan teknis logam, tekstil dan alat mesin pertanian.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang perindustrian meliputi bidang industri kecil dan menengah, bidang industri tekstil aneka elektronika dan telematika, bidang industri logam mesin dan alat transportasi, bidang industri agro kimia dan hasil hutan, dan pelayanan teknis makanan minuman dan kemasan dan pelayanan teknis logam tekstil dan alat mesin pertanian
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Perda Nomor Tahun 2016

2.2 Sumber Daya dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir Desember 2018 sebanyak 72 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai negeri sipil fungsional umum sejumlah 61 orang atau (84,72%) dan fungsional tertentu sejumlah 11 orang (15,28%).
- Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut:
 - Berkualifikasi pasca sarjana (S2) 14 orang (19,45%)

- Berkualifikasi Sarjana (S1) 44 orang (61,45%)
- Berkualifikasi D3 sebanyak 6 orang (8,33%)
- Berkualifikasi SLTA 7 orang (9,72%)
- Berkualifikasi SLTP 1 orang (1,39%)

Ditinjau dari jumlah PNS yang ada pada dinas Perindustrian dan Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai, namun bila dilihat dari tingkat kopetensiya perlu peningkatan SDM yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai negri sipil di dalam menjabat suatu jabatan struktural maupun jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta khususnya dalam menujung visi dan misi organisasi. Mengenai pegawai negeri sipil yang mengisi jabatan fungsional tertentu sebanyak 11 orang perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan kompetensinya dan perlu dipertegas implementasi penugasannya agar lebih optimal dn tidak tumpang tindih. Selain faktor jumlah dan kualifikasi pendidikan, faktor lain yang sangat perlu mendapat perhatian adalah motivasi dan kedisiplinan.

2.3 Kinerja Pelayanan dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

2.3.1 Sumber Daya Keuangan

Sumber pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan dana APBN. Dinas Perindustrian memperoleh pendapatan daerah dari retribusi: ekstensifikasi pemakaian kekayaan unut pelayanan teknis logam dan tekstil.

Sedangkan untuk pelaksanaan tekstil dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi UPT Logam dan Tekstil.

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Perindustrian Provinsi Sulaesi Selatan bersumber dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Adapun target Pendapan Asli Daerah (PAD) dinas perindustrian provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Target dan Realisasi PAD 2017

TAHUN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
2014	6.600.000.000	4.171.464.820	63,20 % (Dinas Perindag)
2015	7.000.000.000	4.610.598.177	65,87 % (Dinas Perindag)
2016	7.051.110.000	5.996.614.000	85,04 % (Dinas Perindag)
2017	518.450.000	131.000.000	51,33 % (Dinas Perindustrian)
2018	151.415.000	146.245.500	96,59 %(Dinas

			Perindustrian)
--	--	--	----------------

Peroleh pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 sebesar Rp. 146.245.500-” atau 96,59% dari taerget penerimaan sebesar Rp. 151.415.000-‘

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2018 terealisasi namun tidak mencapai nilai optimal. **Penurunan PAD** Dinas Perindustrian Tahun 2018 disebabkan karena:

1. UPTD Tekstil

: - Mesin dan peralatan sudah tua.

• Harga bahan bahan baku tinggi dan langkanya bahan baku benang local.
2. UPTD Logam

: - mesin/peralatan sudah tua, ada yang rusak dan tidak persis lagi

Sehingga tidak dapat bersaing dengan competitor lain yang memiliki
Mesin/peralatan yang moderen dan terbaru.

- Tidak adanya sarana berupa mobil service untuk menjangakau pelayanan kepada pelanggan.
- SDM terbatas

Dinas Perindustrian Provensi Sulawesi Selatan sebagai perangkat otonomi daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana yang baersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (dekonstrasi).

Jumlah APBD Sektor INDUSTRI Tahun 2018 (per Desember 2018)

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2018	Rp. 23.950.331.229-,	Rp. 22.974.611.347-,	95,81%

Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2018 APBD Disperindustrian Prov. Sul-Sel Tahun 2018 sebesar Rp. 23.950.331.229 Belanja langsung yang terdiri dari 7 (Tujuh) program dan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan sebesar **Rp.15.296.574.970-**, dengan realisasi Rp. 14.948.765.400-, (97,73%).

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun Anggaran 2018 Dinas perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi (APBN) di Sektor Industri, dengan jumlah dana **Rp. 3.029.000.000,-**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.748.333.853,-**, (90,73%).

Pencapaian sasaran kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategik 2013-2018 dan rencana kinerja Tahun 2018 yang juga tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

Sasaran yang dicapai Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Pada tahun 2018 Dinas perindustrian melaksanakan 7 program dan 36 Kegiatan yang dijabarkan yaitu sebagai berikut:

Pada urusan industri terdapat 7 program, yaitu 1) program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan prioritasnya adalah sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dimana capaian programnya adalah optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program dan daerah, kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran dimana capaian programnya terlaksana pelayanan administrasi perkantoran **2) program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD** Kegiatan prioritasnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dimana capaian programnya tersedianya sarana dan prasarana aparatur, kegiatan penataan SDM aparatur dimana capaian programnya adalah meningkatnya disiplin aparatur. **3) program peningkatan pembangunan system perencanaan dan system evaluasi kinerja** kegiatan prioritasnya adalah perencanaan monitoring dan evaluasi capaian programnya adalah tersedianya bahan kebijakan pembangunan industri, kegiatan forum SKPD capaian programnya adalah terjalinya koordinasi kegiatan pemerintah provinsi dan kab/kota, kegiatan peningkatan system informasi industri dan perdagangan capaian programnya adalah dimanfaatkannya informasi industri Sulsel melalui situs internet, kegiatan penataan administrasi keuangan dimana capaian programnya tersedianya laporan dan dokumen SKPD, terlaksananya kegiatan bimtek/FGD pengelolaan keuangan berbasis akrual dan aset daerah. **4) Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi** kegiatan prioritasnya adalah kegiatan peanatausahaan UPTD mamin dan kemasan dimana capaian programnya meningkatnya daya saing produk IKM Sulsel, kegiatan pengembangan dan peningkatan rumah kemasan dimana capaian programnya meningkatnya daya saing produk Sulsel, kegiatan pengembangan dan peningkatan UPTD mamin dan kemasan dimana capaian programnya meningkatnya daya saing produk IK Sulsel, kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri dimana capaian programnya adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat pengusaha industri kecil dan menengah, **5) program pengembangan industri kecil menengah** kegiatan prioritasnya terdapat kegiatan pengembangan industri 24 kab/kota dimana capaian programnya meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya informasi IKM di Sulsel, kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dimana capaian programnya terlaksana pelatihan SDM industri Sumber Daya lokal, kegiatan pendukung IKM kerajinan Sulsel dimana capaian programnya meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM dan pengembangan industri kerajinan, kegiatan pembinaan pengolahan pangan, dimana capaian programnya adalah bertambahnya wirausaha baru serta tersosialisasinya hasil industri kopi secara internasional, kegiatan pembinaan dan pengembangan IKM hasil tembakau, dimana capaian programnya adalah meningkatnya wawasan masyarakat

tentang cukai tembakau, kegiatan identifikasi perkembangan IKM dimana capaian programnya bertambahnya pengetahuan wirausaha baru, kegiatan karnaval silk of south sulawesi, dimana capaian programnya adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang industri kreatif, kegiatan pameran inacraft dimana capaian programnya adalah terpromosikannya produk hasil kerajinan khas Sulsel, kegiatan diversifikasi pengolahan limbah kulit jagung dimana capaian programnya presentase kemampuan SDM industri kerajinan & 6 juara lomba desain, pembinaan dan pelatihan industri kimia hilir, dimana capaian programnya adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha garam beryodium, kegiatan sosialisasi Perda RIPIP, dimana capaian programnya adalah meningkatnya pemahaman tentang RIPIP. **6) Program peningkatan kemampuan teknologi industri** kegiatan pelatihan teknis Hp capaian programnya presentase peningkatan kemampuan SDM industri elektronika/telematika, kegiatan penatausahaan UPTD logam, alsintan dan tekstil dimana capaian programnya termanfaatkannya 3 UPT, pelayanan dan pengembangan UPTD Logam dimana capaian programnya tertibnya sarana dan prasarana UPT logam, pelayanan dan pengembangan UPTD tekstil, kegiatan pembinaan kemampuan teknologi logam dimana capaian programnya terlaksananya pelatihan perbengkelan bagi IKM alsintan, kegiatan pelatihan tehniisi alat transportasi capaian programnya presentase peningkatan alat transportasi. **7) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial** kegiatan prioritasnya adalah kegiatan pengembangan sentra tekstil dan sutra, dimana capaian programnya meningkatnya kemampuan IKM pertekstilan dan persuteraan dan meningkatnya pasar produk kerajinan kain tradisional, kegiatan pengembangan sentra pande besi capaian programnya terlaksananya pelatihan teknik perekayasaan alat/mesin pertanian bagi IKM alsintan, kegiatan pengembangan sentra rumput laut dimana capaian programnya meningkatnya pengetahuan dan wawasan SDM pelaku industri rumput laut dalam mengolah rumput laut menjadi produk jadi, kegiatan pembentukan sentra industri maubel dimana capaian programnya adalah terbinaanya SDM pelaku industri maubel, kegiatan pengembangan sentra kakao dimana capaian programnya adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan SDM pelaku usaha kakao, kegiatan pengembangan sentra kajian emas dan perak dimana capaian programnya meningkatnya kemampuan IKM kerajinan perhiasan dan meningkatnya pasar produk perhiasan.

Pencapaian sasaran kinerja dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pencapaian dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 547.106.125-, dan dapat di realisasi sebesar Rp. 541.643.135-, atau sebesar 99,00 persen. Capaian program ini adalah untuk optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan, komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah: optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah.
 - b. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran dialokasikan anggaran sebesar Rp. 591.693.875-, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 584.289.370-, atau 98,75 %. Capaian program ini adalah optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan, komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari perogram ini adalah: administrasi kantor berjalan dengan baik.
2. Program peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.763.231.000-, dan dapat direalisasi sebesar Rp.

- 1.719.231.360-, atau 97,50 %. Capaian program ini adalah optimalnya kinerja pelayanan persuratan, komunikasi dan peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah: meningkatnya disiplin aparatur.
- b. Kegiatan penataan SDM Aparatur dialokasikan anggaran sebesar Rp. 255.690.000-, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 255.690.000-, atau 100 %. Capaian program ini adalah optimalisasi sarana dan prasarana aparatur, peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Hasil dari program ini adalah: peningkatan disiplin aparatur.
3. Program peningkatan pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan perencanaan monitoring dan Evaluasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 449.320.000-, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 421.542.302-, atau sebesar 93,82 %. Capaian program ini adalah tersedianya bahan kebijakan, bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil dari program ini adalah: tersedianya bahan kebijakan pembangunan dan pengembangan industri.
- b. Kegiatan Forum SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.661.970-, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 75.300.700-, atau sebesar 93,35 %. Capaian program ini adalah tersedianya bahan kebijakan, bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara indag. Hasil program ini adalah: adanya koordinasi kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.
- c. Kegiatan peningkatan Sistem Informasi dan Perdagangan Informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 112.140.000-, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 112.140.000-, atau sebesar 100 %. Capaian program ini adalah tersedianya bahan kebijakan, bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil dari program ini adalah: dimanfaatkan informasi Industri Sulsel melalui situs internet.
- d. Kegiatan penataan Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 137.780.000-, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 137.560.000-, atau sebesar 99,84 % capaian program ini adalah tersedianya dokumen keuangan dan jumlah peserta bimtek. Hasil dari program ini adalah: tersedianya laporan dan dokumen SKPD, terlaksananya kegiatan bimtek/FGD pengelolaan keuangan berbasis akrual dan asset daerah.
4. Program pengembangan sentra-sentra Industri Potensial, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan pengembangan Sentra Tekstil dan Sutra dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 1.950.526.819-, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.788.980.445-, atau sebesar 91,72 %. Capaian program ini adalah tumbuh dan kembangnya 9 sentra IKM tekstil dan sutra di Sulsel. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya sentra tekstil dan sutra di Sulsel.
- b. Kegiatan pengembangan Sentra Pandai Besi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 389.050.000-, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 388.829.906-, atau sebesar 99,94 %. Capaian program ini adalah tumbuh dan kembangnya 5 sentra IKM pandai besi. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya sentra industri pandai besi di kab.Enrekang
- c. Kegiatan pengembangan Sentra Rumput Laut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.075.000-, dan dapat di realisasi sebesar Rp. 79.945.000-, atau sebesar 99,86%. Capaian program ini adalah terbentuknya Sentra Industri Rumput Laut di Sulsel. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya 1 sentra industri rumput laut di kab.Bone.
- d. Kegiatan Pengembangan Sentra Industri Meubel dialokasikan anggaran sebesar Rp. 101.123.000-, dan dapat di realisasi sebesar Rp. 101.113.000-, atau sebesar 99,99 %. Capaian program ini adalah terbentuknya sentra

- industri meubel di Sulsel. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya 1 sentra industry meubel di kab.Takalar.
- e. Kegiatan pengembangan sentra kakao di alokasikan anggarannya sebesar Rp. 80.657.000,-, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 80.367.000,-, atau sebesar 99,64 %. Capaian program ini adalah terbentuknya sentra industry kakao di Sulsel. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya 1 sentra industry kakao di kab.Luwu.
 - f. Kegiatan pengembangan Sentra Kerajinan Emas dan Perak dialokasikan anggaran sebesar Rp. 896.233.181,-, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 883.033.035,-, atau sebesar 98,53 %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan peserta latihan bidang kerajinan emas dan perak. Hasil dari program ini adalah: peningkatan kemampuan SDM industri kerajinan.
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan pengembangan industri 24 kan/kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 537.127.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 529.376.200,- atau sebesar 98,56 %. Capaian program ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya informasi IKM di Sulsel.
 - b. Kegiatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 96.274.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 95.951.000,- atau sebesar 99,66 %. Capaian program ini adalah terlaksananya pelatihan SDM Sumber Daya Lokal. Hasil dari program ini adalah: terlatihnya SDM industri yang berbasis Sumber Daya Lokal Sulsel.
 - c. Kegiatan Sosialisasi Perda RIPIP dialokasikan anggaran sebesar Rp. 193.400.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 193.393.425,- atau sebesar 100%. Capaian program ini adalah tersusunnya Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi di Sulsel dan terbentuknya Roadman. Hasil dari program ini adalah: 1 dokumen.
 - d. Kegiatan Pendukung IKM Kerajinan Sulsel (Dekranas) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 532.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 524.370.600,- atau sebesar 98,57 %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan peserta latihan bidang industri fashion dan kerajinan. Hasil dari program ini adalah: 1 pameran dan 1 karnaval.
 - e. Kegiatan Pembinaan dan Pengolahan Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 856.406.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 856.393.699,- atau sebesar 100 %. Capaian program ini adalah meningkatnya industri pengolahan pangan. Hasil dari program ini adalah: bertambahnya wirausaha baru pembuatan kue tradisional khas Sulsel.
 - f. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Industri Kimia Hilir dialokasikan anggaran sebesar Rp. 66.312.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 65.842.000,- atau sebesar 99,29 %. Capaian program ini adalah meningkatnya industri pupuk. Hasil dari program ini adalah: meningkatnya keterampilan 30 orang kelompok IKM Pupuk dan 90 orang Paving Block.
 - g. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan IKM Hasil Tembaku dialokasikan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 400.000.000,- atau sebesar 100 %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan peserta latihan bidang teknologi industri.

Hasil dari program ini adalah; peningkatan kemampuanSDM Industri Temabakau.

- h. Kegiatan Identifikasi Perkembangan IKM dialokasikan anggaran sebesar Rp. 206.251.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 201.060.000,- atau sebesar 97,48 %. Capaian program ini adalah tersedianya data sebagai bahan dasar informasi didalam pengembangan industri di Sulsel. Hasil dari program ini adalah: tersusunnya data dan informasi yang lengkap tentang industri Sulsel.
 - i. Kegiatan Karnaval Silk Of South Sulawesi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 764.550.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 763.295.192,- atau sebesar 99,84 %. Capaian program ini adalah peningkatan kemampuan peserta latih bidang industri fashion dan kerajinan. Terlaksanakannya pameran Munas Dekranas dan Karnaval Silk Of South Sulawesi. Hasil dari program ini adalah: terpromosikannya sutera cirri khas Sulsel.
 - j. Kegiatan Pameran Inacraft dialokasikan anggaran sebesar Rp. 360.940.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 360.940.000,- atau sebesar 100 %. Capaian program ini adalah terpromosikannya produk kerajinan khas Sulsel. Hasil dari program ini adalah: terpromosikannya ke masyarakatan luas produk hasil kerajinan khas Sulsel.
 - k. Kegiatan Diverifikasi Pengolahan Limbah Kulit Jagung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 539.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 538.608.400,- atau sebesar 99,91 %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan peserta latih bidang teknologi industri. Hasil dari program ini adalah: peningkatan kemampuan SDM industri kerajinan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Penataan UPTD Mamin dan Kemasan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 473.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 466.247.338,- atau sebesar 98,55%. Capaian program ini adalah meningkatnya kualitas, desain, produk, produktivitas dan efisien IKM. Hasil dari program ini adalah : meningkatnya daya saing produk IKM Sulsel.
 - b. Kegiatan pengembangan dan peningkatan rumah kemasan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 101.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 100.900.000,- atau sebesar 99,90%. Capaian programnya ini adalah meningkatnya daya saing produk Sulsel.
 - c. Kegiatan pengembangan dan peningkatan UPTD mamin dan kemasan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 204.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 203.465.000,- atau sebesar 99,74%. Capaian program ini adalah meningkatnya daya saing produk IK Sulsel.
 - d. Kegiatan pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 572.355.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 570.099.907,- atau sebesar 99,61 %. Capaian program ini adalah terciptanya prototype mesin peralatan industri. Hasil dari program ini adalah: jumlah prototype alat/mesin industri.
 - e. Kegiatan Pengembangan Technopark Berbasis IT dialokasikan anggaran sebesar Rp. 463.215.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 460.752.363,- atau sebesar 99,47 %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan teknologi industri elektronika/telematika. Hasil dari program ini adalah: meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM teknologi industri elektronika dan IT.

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Pelatihan Teknisi HP dialokasikan anggaran sebesar Rp. 161.925.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 158.999.291,- atau sebesar 98,19%. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan peserta latih bidang teknologi elektronika/telematika.
 - b. Kegiatan Penatausahaan UPTD Logam, alsintan dan tekstil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 462.115.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 442.859.000,- atau sebesar 95,83%. Capaian program ini adalah: termanfaatkannya 3 UPT oleh IKM Persuteraan (Pemintalan dan Pertenunan).
 - c. Kegiatan pelayanan dan pengembangan UPTD logam dialokasikan anggaran sebesar Rp. 396.085.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 371.821.132,- atau sebesar 93,87%. Capaian program ini adalah terbitnya saran dan prasarana UPT logam.
 - d. Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan UPTD Tekstil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 139.750.000,- atau sebesar 99,82%. Capaian program ini termanfaatkannya 3 UPT tekstil.
 - e. Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Logam dialokasikan anggaran sebesar Rp. 128.225.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 128.050.000,- atau sebesar 99,86%. Capaian program ini terlaksananya pelatihan perbengkelan bagi IKM alsintan.
 - f. Kegiatan Pelatihan Teknisi Alat Transportasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 206.925.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 206.925.000,- atau sebesar 100%. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan peserta latih bidang teknologi industri alat transportasi. Hasil dari program ini adalah: peningkatan SDM alat transportasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 meskipun telah menunjukkan pencapaian sasaran yang memadai namun masih ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan dalam rangka optimalisasi sumber daya untuk mendukung pengembangan Sektor Perindustrian di Provinsi Sulawesi Selatan. Hambatan dan permasalahan yang dimaksud antara lain adalah:

3.1.1. Faktor Internal

1. Belum berfungsinya secara optimal sistem informasi yang ada sehingga tingkat layanan pada dunia usaha dalam aspek informasi teknologi industri, peluang dan tantangan pasar masih relatif rendah.
2. Keserasian dan sinergitas program antar perangkatat pelaksanaan masih perlu ditingkatkan dan terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina.
3. Sistem pembelanjaan organisasi (*learning organization*) belum berjalan secara optimal serta belum mampu mengembangkan budaya belajar dan bekerja (*learning by doing*).

3.1.2 Faktor Eksternal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, sehinggaa memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi yang di pandang dapat mempengaruhi.

1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperature, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang makin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negative terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak saja mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana

model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO₂ dan Metana yang berasal industri, Kendaraan bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, pertanian dan fungsi lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang.

2. Perdagangan Bebas

Globalisasi telah merambah hampir semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (linkage), dan saling ketergantungan (interdependence). Scenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan Negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas banyak member dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak multiplier effect pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial. Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kanca perekonomian global.

Dari kedua kondisi tersebut maka hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Industri

- a. Rendahnya daya saing dan kualitas industri lokal
- b. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri
- c. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia industri
- d. Terbatasnya kemampuan pelaku IKM terkait inovasi dan update teknologi industri

- e. Belum adanya ikon produk industri yang identik di masing-masing kabupaten kota
- f. Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan industri tidak sesuai dengan kebutuhan
- g. Meningkatnya produk impor yang murah yang kurang bersaing dengan produk lokal
- h. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM
- i. Belum maksimalnya penataan kawasan sentra industri

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka strategi pemecahan masalah yang dapat ditempuh, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, stakeholder terkait, serta meningkatkan sinergitas pembinaan antara perangkat pelaksana dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat investor pada sector industri terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer.
3. Meningkatkan kemampuan SDM para pelaku usaha, khususnya IKM.
4. Meningkatkan kemampuan inovasi teknologi, khususnya IKM melalui kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar.
5. Meningkatkan kapasitas sarana distribusi dan kemampuan logistic.
6. Penataan dan pengembangan system informasi industri yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat untuk penyusunan program dan rencana pembinaan serta berfungsi sebagai sumber informasi yang efisien dan efektif bagi dunia usaha.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur Ygn mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran organisasi (*learning organization*)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Thun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, dan Berkarakter.”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. **INOVATIF** adalah kondisi pemerintah yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang bersih dan melayani.
2. **KOMPETITIF** adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang sehat dan cerdas.
3. **PRODUKTIF** adalah kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera.
4. **INKLUSIF** adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang mengakibatkan partisipasi seluruh unsure masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi.
5. **BERKARAKTER** adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandas oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang berkarakter.

3.2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumus misi sebagai berikut:

1. ***Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif***
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi.
2. ***Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel***
Membangun infrastruktur dalam menguatkan interkonektivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir.
3. ***Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif***
Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah.
4. ***Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter***
Memenuhi akses pendidikan yang berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa hambatan bagi seluruh warga serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah.

5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

3.3. Telaahan Resentra K/L dan Resentra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Kementrian Perindustrian

Pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan saksama agar pemerintah mampu mewujudkan Visi Indonesia **menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025** sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri. Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis financial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Visi pembangunan industri nasional jangka panjang tahun 2025 adalah membawahkan Indonesia pada tahun 2025 menjadi negara industri tabgguh yang bercirikan:

1. Industri kelas dunia;
2. PDB Sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan di Luar Jawa;
3. Teknologi telah menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar;

Visi pembangunan Industri Indonesia pada tahun 2025 adalah menjadi negara industri tangguh dengan cirri-ciri seperti yang telah disampaikan diatas. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi antara untuk tahun 2020 yaitu Indonesia menjadi negara industri maju baru, dan visi yaitu Memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan (*sustainable*) serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan cirri-ciri sebagai berikut:

1. Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi.
2. Terseleksikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai ta,bah.
3. Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
4. Tercapainya peningkatan industri penunjang komponen.
5. Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi)

Sesuai dengan visi diatas, maka misi lima tahun sampai dengan tahun 2018 dijabarkan sebagai beriku:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri
2. Mendorong peningkatan penguasaan domestic dan internasional
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri

6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar p[ulau jawa
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDRB

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Tingginya nilai tambah industri, dengan indicator Kinerja Utama:

1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;
2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

Sasaran Strategi II: Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan indicator Kinerja Utam:

1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional;
2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.\

Sasran Srtategis III: Kokohnya factor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;
2. Indeks iklim industri Nasional.

Sasaran Strategia IV: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif;
2. Pemanfaata hasil penelitian dan pengembangan oleh sector industri.

Sasaran Strategis V: Kuat, lengkap dan dalamnya struktru industri, dengan indicator Kinerja Utama:

1. Tumbubuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia);
2. Tumbuhnya Industri Komponen *Automotive*, Elektronika dan Pemasaran;
3. Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.

Sasaran Strategis VI: Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Meningkatnya kontribusi manufaktur di luar pulau jawa terhadap PDB nasional;
2. Jumlah investasi baru industri jasa pendukung dan kmponan industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sasaran Strategi VII:Meningkatnya peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Tumbuhanya Industri Kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Tumbuhnya Industri Menengah dua kali diatas industri Kecil;
3. Menigkatnya jumlah output IKM yang menjadi “*Out-Source*” Industri Besar.

3.4 Telaah Rencan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna

mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. PP Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategi nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi sosial, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.

1. Kepulauan Selayar Kawasan Banteng dan Kawasan Pamatata
2. Bulukumba (Agroindustri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan)
3. Bantaeng Kawasan Perkotaan
4. Jeneponto (Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata)
5. Takalar Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)
6. Gowa Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)
7. Sinjai kawasan pusat kegiatan lokal
8. Maros Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)
9. Pangkep (Agroindustri, Perikanan, Pariwisata)
10. Barru (Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan) dan Kawasan EMAS
11. Watampone (Agroindustri, Perikanan, Pertanian)
12. Soppeng kawasan pusat kegiatan lokal
13. Wajo kawasan pusat kegiatan lokal
14. Sidrap kawasan pusat kegiatan lokal
15. Pinrang kawasan pusat kegiatan lokal
16. Enrekang kawasan pusat kegiatan lokal
17. Luwu kawasan pusat kegiatan lokal
18. Tana Toraja kawasan pusat kegiatan lokal
19. Luwu Utara kawasan pusat kegiatan lokal
20. Luwu Timur KTM Mahalona Kawasan pusat kegiatan lokal
21. Toraja Utara kawasan pusat kegiatan lokal
22. Makassar kawasan perkotaan mamminasata (perdagangan dan jasa)
23. Parepare (Agroindustri, Perikanan)
24. Palopo (Agroindustri, Perkebunan, Pertanian)

Sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata

dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan public berskala provinsi. Sedangkan sistem perkotaan provinsi sebagaimana arahan RTRWP selain mengalokasikan sistem perkotaan nasional sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan public berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai ibu kota kabupaten di Bantaeng, Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Banteng, Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rartepao, dan Sengkang, kawasan perkotaan KTM Mahalona di kabupaten Luwu Timur, kawasan perkotaan EMAS di kabupaten Barru sebagai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan perkotaan Pamatata di kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan pusat distribusi bahan kebutuhan pokok kawasan timur Indonesia.

Rencana Struktur Ruangan Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat, kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman. Tentang RTRW Prov. Sulsel Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Metropolitan Mamminasata diarahkan sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama Kawasan Timur Indonesia, serta sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi di Sulawesi Selatan. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan di Kota Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto, dan Bulukumba. PKW merupakan kawasan perkotaan berfungsi sebagai simpul kegiatan perdagangan.

Selain Pusat Kegiatan Lokal, RTRWP Sulawesi Selatan juga menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Sulawesi Selatan terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan berfungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah:

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
 1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, Pangkep, Maros, Gowa, dan Takalar;
 2. Kawasan pengembangan budidaya alternative komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Rousta, jambu mete dan jarak di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Torja, Toraja Utara dan Kabupaten Selayar;
 3. Kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur;

4. Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak di Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo;
5. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Mamminasata;
7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru;
8. Kawasan Industri (KI) skala besar meliputi: kawasan-kawasan industri di wilayah Metropolitan Mamminasata yang terdiri atas KI Makassar (Kota Makassar), KI Maros (Kabupaten Maros), KI Gowa (Kabupaten Gowa), KI Takalar (Kabupaten Takalar), selain dari pada itu diarahkan pengembangan KI Parepare (Kota Parepare), pabrik pengolahan nikel Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), pabrik semen Tonasa (Kabupaten Pangkep), pabrik semen Bosowa (Kabupaten Maros)
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Sosial dan Budaya yaitu: kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba.
- c. Kawasan Strategi Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, yaitu:
 1. Kawasan Migas terdiri atas: blok Bone Utara (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kombuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Kepulauan Selayar;
 2. Pusat-pusat pembangkit listrik terdiri atas PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto), PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang) di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu:
 - Kawasan wisata Bahari Mamminasata dan sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pangkep); Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar);
 - Kawasan Konservasi Kawasan Danau Tempe (Kabupaten Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap);
 - Kawasan bendungan yang terdiri atas Bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone).

Pengembangan kawasan di Sulawesi Selatan, selain didasarkan pada RTRWP juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan keberadaan Kawasan Andalan Laut dan Kawasan Andalan Darat di Sulawesi Selatan. Kawasan Andalan merupakan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan

wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. Adapun kaeasan andalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Kawasan Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan agroindustri.
- b. Kawasan Palopo dan sekitarnya dengan sector unggulan pariwisata, perkebunana, pertanian, dan perikanan.
- c. Kawasan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, dan perdagangan.
- d. Kawasan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, agroindustri dan pertanian.
- e. Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- f. Kawasan Andalan Laut Teluk Bobne dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan pertambangan.
- g. Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata. Tipe iklim D dengan curah hujan rata-rata 2000-2500 MM/tahun. Tipe iklim ini terbagi 3 yaitu wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputi kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja dan Enrekang. Wilayah yang termasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi Kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Kota Makassar. Tipe iklim E dengan curah hujan rata-rata NTARA 1500-2000 MM/tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat di Kabupaten Maros, Bone dan Enrekang, Bantaeng dan Selayar.

Pengelolaan kawasan peruntukaan industri di Sulawesi Selatan dikategorikan dalam kawasan industri skala besar dan kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah. Pengelolaan kawasan peruntukan industri di Sulawesi Selatan ditetapkan di;

- a. Kawasan industri skala besar diarahkan pada Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa;
- b. Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah diarahkan pada: Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan analisis terhadap (1) permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) peranannya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023, (3) Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, (4) potensi dan kondisi serta rencana pembangunan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan (5) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh, maka ditetapkan isu-isu strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Resentra) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Pengembangan industri di 24 Kabupaten/Kota yang berbasis sumber daya lokal
2. Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, inovasi produk lokal dan sistem produksi industri untuk meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Peningkatan kelembagaan dan tata laksana pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan diartikan sebagai sesuatu yang dicapai dari setiap misi Dinas Perindustrian yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan diartikan sebagai sesuatu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasi kan terstruktur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2018-2023.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 sebagaimana dalam table 4. berikut ini:

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan berkarakter	
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	
TUJUAN	SASARAN
(1) Meningkatkan kelembagaan dan tata uasaha laksana pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan	(1) Optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah (2) Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan kapabilitas aparatur (3) meningkatnya disiplin aparatur
MISli : (3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	
TUJUAN	SASARAN
(2) Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerkyatan	(6) meningkatnya kemampuan teknologi dan inovasi industri
(5) mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru	(7) Tumbuh dan berkembangnya Sentra industri dan kawasan industri
MISI : (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarater	

TUJUAN	SASARAN
(4) Meningkatkan oenyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri	(4) Meningkatnya kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi
MISI : (5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	
TUJUAN	SASARAN
(3) Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industry	(5) Tumbuh dan berkembangnya induatri besar, kecil dan menengah di Kabupaten/Kota serta hilirisasi sektor perindustrian

Tabel 4.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperehensif tentang bagaimana Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasarn dalam Rensra dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yagn menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan origram-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategis tersebut selanjutnya diperjelas dengan sserangkaian kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisien pencapaian target sasaran.

Rumusan kebjakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditmpuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembagnunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembengunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) bagi Dinas Perindustrian.

Strategi dan Kebijakan Umum Renstra Dinas Perindustrian Provinisi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 sebagaimana dalam tabel 4.4 berikut ini:

VISI: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter		
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Melayani dan Inovatif		
SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)Optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah	(1) Peningkatan Sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	(5) sinergitas pemerintah sektor industri
(2) Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan kapabilitas aparatur	(2) Peningkatan kapasitas, kompeensi dan kapabilitas pelayanan aparatur sipil negara	(6) upgrading pelayanan aparatur sipil negara industri
(3) menigkatnya disiplin aparatur	(3) Peningkatan kesadaran dan kedisiplinan para apparatus sipil negara	(7) disiplin aparatur sipil negara industry

MISI : (3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif		
SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(6) Meningkatnya kemampuan teknologi dan inovasi industri	(4) Peningkatan inovasi dan updating teknologi industri	(4) Inovasi industry
(7) Tumbuh dan berkembangnya Sentra industri dan kawasan industri	(5) Pembinaan dan pengembangan sentra industri dan kawasan industri	(3) pegenembangan sentra dan kawasan indsutri
MISI : (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter		
SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(4) Meningkatnya kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi	(6) Peningkatan kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi industri	(2) Sistem vokasional (magang) industry
MISI : (5) Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(5) Tumbuh dan berkembangnya industri besar, kecil dan menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektro perindustrian	(7) Peningkatan jumlah Industri besar, kecil dan menengah dan hilirisasi industri	(1) Hilirisasi industry

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023serta indikator kinerja, kelompok dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perindustrian bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode.

Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai. Indikator kinerja yang ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 disajikan pada table berikut :

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan bidang / urusan perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan perindustrian dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 – 2023.

Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan perindustrian dan atau target kinerja sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKPJ) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Kinerja (LKPJ) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 ini.

Kepala Dinas
Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan



H. AHMADI AKIL, SE, MM
Pangkat : Pembina UtamaMuda
NIP. 19651231 199403 1 081

LAPORAN KINERJA PELAYANANAN
DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%		
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,228,663,810	1,017,655,650	1,180,105,650	846,805,920	1,138,800,000	1,207,113,202	990,774,525	1,161,445,650	791,184,420	1,125,932,505	98.25	97.36	98.42	93.43	98.87	4,500,991,030	4,375,704,298
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	425,000,000	365,000,000	510,000,000	370,000,000	547,106,125.00	420,892,299	352,072,500	492,975,000	368,260,740.00	541,643,135	99.03	96.46	96.66	99.53	99.00	1,779,421,225	1,742,529,166
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	803,663,810	652,655,650	670,105,650	476,805,920	591,693,875.00	786,220,903	638,702,025	668,470,650	422,923,680	584,289,370	97.83	97.86	99.76	88.70	98.75	2,721,569,805	2,633,175,132
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD	9,658,898,250	2,448,665,000	12,060,096,659	1,661,280,000	2,018,921,360	9,641,823,800	10,375,822,940	11,954,367,834	1,530,858,324	1,974,921,360.00	99.82	423.73	99.12	92.15	97.82	26,232,724,181	33,897,857,170
	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,309,968,000	1,308,150,000	2,026,550,000	1,301,980,000	1,763,231,360	1,305,149,800	1,306,976,000	1,987,606,500	1,240,302,611	1,719,231,360	99.63	99.91	98.08	95.26	97.50	6,299,294,272	6,183,881,183
	Penataan SDM Aparatur	673,059,000	1,140,515,000	1,013,700,000	359,300,000	255,690,000	663,920,000	1,087,494,600	1,006,744,000	290,555,713	255,690,000	98.64	95.35	99.31	80.87	100.00	3,237,712,000	3,099,852,313
	Perencanaan/Pembang unan gedung Disperindag Prov. Sulsel	7,675,871,250	9,097,471,100	9,019,846,659	0	0	7,672,754,000	7,981,352,340	8,960,017,334	0	0	99.96	87.73	99.34	0	0	25,793,189,009	24,614,123,674
	Pemeliharaan dan penataan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA	1,260,395,000	1,117,690,000	1,440,104,382	1,386,159,238	779,901,970	1,235,802,545	1,037,524,000.00	1,437,700,382.00	1,264,486,546.00	746,543,002	98.05	92.83	99.83	91.22	95.72	5,360,329,014	5,124,822,073
	Perencanaan, monitoring dan evaluasi	546,245,000	574,990,000	727,059,382	459,678,858	449,320,000	540,431,045	506,674,000.00	725,379,382.00	424,378,158.00	421,542,302	98.94	88.12	99.77	92.32	93.82	2,397,837,240	2,281,171,045
	Forum SKPD	0	0	0	87,390,000	80,661,970	0	0	0	87,390,000.00	75,300,700	0	0	0	100.00	93.35	103,522,394	102,450,140
	Peningkatan sistem informasi industri dan perdagangan	190,750,000	120,300,000	112,145,000	488,200,000	112,140,000	172,062,500.00	110,300,000.00	112,145,000.00	473,950,000.00	112,140,000	90.20	91.69	100.00	97.08	100.00	933,823,000	890,885,500
	Penataan administrasi keuangan	523,400,000	422,400,000	600,900,000	350,890,380	137,780,000	523,309,000.00	420,550,000.00	600,176,000.00	278,768,388.00	137,560,000	99.98	99.56	99.88	79.45	99.84	1,925,146,380	1,850,315,388
IV	PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	902,923,000	1,520,748,000	1,558,923,000	1,532,780,000	1,813,670,000	894,063,000	1,505,336,700	1,466,676,300	1,527,631,726	1,801,464,608	99.02	98.99	94.08	99.66	99.33	1,925,146,380	1,850,315,388
	Penatausahaan UPTD Mamin dan Kemasan	0	0	0	502,000,000	473,100,000	0	0	0	499,524,985	466,247,338	0	0	0	99.51	98.55	596,620,000	592,774,453
	Pengembangan dan Peningkatan Rumah Kemasan	0	0	650,235,000	0	101,000,000	0	0	648,749,600	0	100,900,000	0	0	99.77	0.00	99.90	670,435,000	668,929,600
	Pengembangan dan Peningkatan UPTD Mamin dan Kemasan	0	0	0	0	204,000,000	0	0	0	0	203,465,000	0	0	0	0	99.74	40,800,000	40,693,000

	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	902,923,000	1,052,843,000	628,728,000	633,780,000	572,355,000	894,063,000	1,037,433,000	588,372,700	633,430,500	570,099,907	99.02	98.54	93.58	99.94	99.61	3,332,745,000	3,267,319,181
	Pengembangan Technopark berbasis IT	0.00	467,905,000	156,525,000	397,000,000	463,215,000	0	467,903,700	156,525,000	394,676,241.00	460,752,363	0	100.00	100.00	99.41	99.47	1,114,073,000	1,111,255,414
	Pembentukan dan pengembangan Alsintan Center	0.00	0.00	123,435,000	0	0	0	0	73,029,000	0	0	0	0	59.16	0	0	123,435,000	73,029,000
V	PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	9,633,982,440	12,430,808,250	3,379,174,000	6,437,472,000	4,552,360,000	3,188,495,776	3,479,098,000	3,228,364,200	4,931,725,008	4,529,231,116	33.10	27.99	95.54	76.61	99.49	1,925,146,380	1850315388
	Pengembangan industri 24 Kab/Kota	7,309,000,000	9,128,921,250	150,000,000	0	537,127,000	927,579,900	134,275,000	0	0	529,376,200	12.69	1.47	0.00	0.00	98.56	16,695,346,650	1,167,730,140
	Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	0	1,168,075,000	824,250,000	767,098,920	96,274,000	0	1,091,885,000	824,250,000	766,888,920	95,951,000	0.00	93.48	100.00	99.97	99.66	2,778,678,720	2,702,214,120
	Promosi produk IKM Sulsel (anthena shop)	1,128,375,000	116,090,000	0	0	0	1,069,605,000	116,090,000	0	0	0	94.79	100	0	0	0	1,244,465,000	1,185,695,000
	Penyusunan PERDA RIPIP	0	0	376,523,000	514,792,500	193,400,000	0	0	376,523,000	514,792,500	193,393,425	0	0	100.00	100.00	100.00	929,995,500	929,994,185
	Pendukung IKM Kerajinan Sulsel (Dekranas)	563,987,440	1,724,472,000	833,300,000	475,775,000	532,000,000	563,290,876	1,724,472,000	833,299,200	467,894,080	524,370,600	99.88	100.00	100.00	98.34	98.57	3,703,934,440	3,693,830,276
	Pembinaan pengolahan pangan	145,045,000	0	300,477,000	510,000,000	856,406,000	144,595,000	0	300,477,000	509,599,600	856,393,699	99.69	0	100.00	99.92	100.00	1,126,803,200	1,125,950,340
	Desain dan teknik produk kerajinan alami	250,000,000	0	312,080,000	0	0	247,500,000	0	311,955,000	0	0	99.00	0	99.96	0	0	562,080,000	559,455,000
	Pembinaan dan pengembangan IKM hasil tembakau	0	0	148,090,000	67,900,000	400,000,000	0	0	148,090,000	67,598,000	400,000,000	0	0	100.00	99.56	100.00	295,990,000	295,688,000
	Identifikasi perkembangan IKM	0	293,250,000	326,895,000	200,000,000	206,251,000	0	293,040,000	326,770,000	200,000,000	201,060,600	0	99.93	99.96	100.00	97.48	861,395,200	860,022,120
	Karnaval Silk Of South Sulawesi	0	0	0	599,680,000	764,550,000	0	0	0	599,452,400	763,295,192	0	0	0	99.96	99.84	752,590,000	752,111,438
	Pameran Inacraft	0	0	0	2,350,910,000	360,940,000	0	0	0	945,364,608	360,940,000	0	0	0	40.21	100.00	2,423,098,000	1,017,552,608
	Pelatihan Aneka Bidang Pangan Bagi aparat penyuluh Perindustrian	0	0	0	359,315,580	0	0	0	0	317,255,100	0	0	0	0	88.29	0	359,315,580	317,255,100
	Diversifikasi pengolahan limbah kulit jagung	0	0	0	320,900,000	539,100,000	0	0	0	272,726,800	538,608,400	0	0	0	84.99	99.91	428,720,000	380,448,480
	Pembinaan dan pelatihan industri kimia hiir	0	0	0	271,100,000	66,312,000	0	0	0	270,153,000	65,842,000	0	0	0	99.65	99.29	284,362,400	283,321,400
	sosialisasi PERDA RIPIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pembentukan kelembagaan IKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kegiatan Pengadaan Rumah Kemasan	237,575,000	120,035,000	0	0	0	235,925,000	119,336,000	0	0	0	99.31	99.42	0	0	0	357,610,000	355,261,000
	Pembinaan IKM Pupuk	0	0	107,559,000	0	0	0	0	107,000,000	0	0	0	0	99.48	0	0	107,559,000	107,000,000
VI	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	2,867,521,500	2,638,814,031	2,834,179,000	2,772,727,500	1,495,275,000	2,860,353,340	2,626,194,826	2,807,970,006	2,645,006,072	1,448,404,423	99.31	99.31	99.31	99.31	99.31	1,925,146,380	11,229,205,129
	Pembinaan kemampuan teknologi elektronika dan informatika	319,675,000	426,055,000	286,170,000	493,391,000	0	316,975,000	426,025,000	286,170,000	492,122,100	0	99.16	99.99	100.00	99.74	0	1,525,291,000	1,521,292,100
	Pelatihan teknis HP	641,725,000	0	329,980,000	330,489,000	161,925,000	640,825,000	0	329,855,000	329,040,451	158,999,291	99.86	0	99.96	99.56	98.19	1,334,579,000	1,331,520,309
	Penatausahaan UPTD Logam, Alsintan dan Tekstil	0	0	0	0	462,115,000	0	0	0	442,859,000	0	0	0	0	95.83	0	92,423,000	88,571,800
	Pelayanan dan pengembangan UPTD Logam	948,500,000	1,404,724,031	693,000,000	556,750,000	396,085,000	948,045,500	1,392,134,826	690,285,580	515,694,076	371,821,132	99.95	99.10	99.61	92.63	93.87	3,682,191,031	3,620,524,208

[illegible]

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET NSPK	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7/12*100	18=8/13*100	19=9/14*100	20=10/15*100	21=11/16*100
1	Tumbuhnya agro industri di 24 Kab/ Kota (unit)	6	6	6	6	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	100	80	80	80	80
2	Tumbuhnya sentra industri potensial (sentra)	1	1	1	1	4	4	4	4	1	2	2	2	2	2	50	50	50	50	200
3	Tersedianya prototype alat/ mesin industri (unit)	5	5	5	5	9	4	4	4	4	3	3	3	3	3	33.33	75	75	75	75

Table T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			% ASN Nilai SKP kategori baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah	Peningkatan jumlah industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/ kota	Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah	1000 IKM	1000 IKM	1000 IKM	1000 IKM	1000 IKM
3	Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru	Peningkatan jumlah Sentra industri dan kawasan industri	jumlah sentra industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan	3 sentra	3 sentra	3 sentra	3 sentra	3 sentra
			Jumlah Kawasan industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja di sektor industri	Peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor industri	jumlah SDM industri yang dibina	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
5	Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri	Peningkatan kemampuan teknologi dan proses inovasi pada industri (innovation core)	Jumlah inovasi industri yang dikembangkan untuk hilirisasi industri	6 Inovasi	6 Inovasi	6 Inovasi	6 Inovasi	6 Inovasi

Table T-C.26			
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	(1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	(1) Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur	(1) Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia
MISI : (3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(2) Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah	(2) Peningkatan jumlah industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/ kota	(4) Meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah	(4) pengembangan industri kecil dan menengah
(5) Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru	(3) Peningkatan jumlah Sentra industri dan kawasan industri	(5) Membina dan mengembangkan sentra industri dan kawasan industri	(3) pengembangan sentra dan kawasan industri
MISI : (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja di sektor industri	(4) Peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor industri	(6) Meningkatkan kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi industri	(2) sistem vokasional (magang) industri
MISI : (5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(3) Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri	(5) Peningkatan kemampuan teknologi dan proses inovasi pada industri (innovation core)	(7) Meningkatkan Inovasi dan teknologi industri untuk hilirisasi industri	(1) inovasi industri untuk hilirisasi industri

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perindustrian
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27 (Verifikasi Akhir)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	0.00	00	50			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	3,840,253,150.00	100 %	4,533,714,982.84	100 %	4,952,946,418.91	100 %	5,094,996,056.43	100 %	5,284,988,700.88	100 %	23,706,899,309.06	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 0	001		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	kegiatan rutin	12 Bulan	398,000,000.00	12 Bulan	508,714,982.84	12 Bulan	537,946,418.91	12 Bulan	549,996,056.43	12 Bulan	604,988,700.88	60 Bulan	2,599,646,159.06	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 0	002		Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operation al Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operation al Roda 2 yang terbayarkan	kegiatan rutin kegiatan rutin	4 Unit 16 Unit	20,000,000.00	4 Unit 16 Unit	100,000,000.00	4 Unit 16 Unit	110,000,000.00	4 Unit 16 Unit	120,000,000.00	4 Unit 16 Unit	130,000,000.00	20 Unit 80 Unit	480,000,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 0	003		Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	46 orang tenaga non PNS	46 Orang	1,471,200,000.00	46 Orang	1,500,000,000.00	46 Orang	1,600,000,000.00	46 Orang	1,650,000,000.00	46 Orang	1,700,000,000.00	230 Orang	7,921,200,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 0	005		Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	kegiatan rutin	12 Jenis ATK	712,409,150.00	12 Jenis ATK	800,000,000.00	12 Jenis ATK	900,000,000.00	12 Jenis ATK	925,000,000.00	12 Jenis ATK	950,000,000.00	60 Jenis ATK	4,287,409,150.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 0	006		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	kegiatan rutin	9 Unit	7,575,000.00	9 Unit	25,000,000.00	9 Unit	30,000,000.00	9 Unit	35,000,000.00	9 Unit	40,000,000.00	45 Unit	137,575,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 0	008		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	kegiatan rutin	2 Jenis	981,069,000.00	2 Jenis	1,200,000,000.00	2 Jenis	1,300,000,000.00	2 Jenis	1,325,000,000.00	2 Jenis	1,350,000,000.00	10 Jenis	6,156,069,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 0	009		Pelaksanaan dan Kelikutsertaan Pameran	Jumlah Kelikutsertaan dalam Pameran	1 pameran pembangunan	1 Pameran	90,000,000.00	1 Pameran	150,000,000.00	1 Pameran	200,000,000.00	1 Pameran	210,000,000.00	1 Pameran	220,000,000.00	5 Pameran	870,000,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 0	010		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	kegiatan rutin	12 Kali	160,000,000.00	12 Kali	250,000,000.00	12 Kali	275,000,000.00	12 Kali	280,000,000.00	12 Kali	290,000,000.00	60 Kali	1,255,000,000.00	Dinas Perindustrian	
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	0.00	00	51			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	643,440,000.00	100 %	721,000,000.00	100 %	777,000,000.00	100 %	837,000,000.00	100 %	930,000,000.00	100 %	3,908,440,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 1	002		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/ rumah dinas yang dipelihara	2 unit rumah dinas	1 Unit	175,000,000.00	1 Unit	150,000,000.00	1 Unit	160,000,000.00	1 Unit	170,000,000.00	1 Unit	180,000,000.00	5 Unit	835,000,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 1	004		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	13 unit gedung kantor	13 Unit	225,000,000.00	13 Unit	200,000,000.00	13 Unit	210,000,000.00	13 Unit	220,000,000.00	13 Unit	230,000,000.00	65 Unit	1,085,000,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 1	006		Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	20 unit kendaraan dinas	10 Unit	70,000,000.00	10 Unit	70,000,000.00	10 Unit	80,000,000.00	10 Unit	87,000,000.00	10 Unit	90,000,000.00	50 Unit	397,000,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 1	007		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	kegiatan rutin	10 Unit	52,000,000.00	10 Unit	52,000,000.00	10 Unit	52,000,000.00	10 Unit	55,000,000.00	10 Unit	100,000,000.00	50 Unit	311,000,000.00	Dinas Perindustrian	
			0 . 0 0	0 0	5 1	008		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	kegiatan rutin	9 Unit	1,000,000.00	9 Unit	50,000,000.00	9 Unit	55,000,000.00	9 Unit	65,000,000.00	9 Unit	70,000,000.00	45 Unit	241,000,000.00	Dinas Perindustrian	

			0 . 0 0	0 0 1	5 1	009		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	kegiatan rutin	3 Unit	42,440,000.00	3 Unit	75,000,000.00	3 Unit	80,000,000.00	3 Unit	85,000,000.00	3 Unit	90,000,000.00	15 Unit	372,440,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 1	5 1	010		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	kegiatan rutin	6 Unit	78,000,000.00	6 Unit	100,000,000.00	6 Unit	110,000,000.00	6 Unit	120,000,000.00	6 Unit	130,000,000.00	30 Unit	538,000,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 1	5 1	012		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/We bsite	Jumlah Sistem Informasi/Aplik asi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informas i yang diposting di Website	kegiatan baru kegiatan rutin	0 Sistem Informasi/Aplikasi	0.00	3 Sistem Informasi/Aplikasi	24,000,000.00	3 Sistem Informasi/Aplikasi	30,000,000.00	3 Sistem Informasi/Aplikasi	35,000,000.00	3 Sistem Informasi/Aplikasi	40,000,000.00	15 Sistem Informasi/Aplikasi	129,000,000.00	Dinas Perindustrian
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	0.00	00	52			PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat	100%	100 %	290,650,000.00	100 %	585,000,000.00	100 %	730,000,000.00	100 %	802,000,000.00	100 %	880,000,000.00	100 %	3,287,650,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 2	5 2	001		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat	1 laporan forum perangkat daerah	100 Orang	50,650,000.00	100 Orang	60,000,000.00	100 Orang	70,000,000.00	100 Orang	80,000,000.00	100 Orang	90,000,000.00	500 Orang	350,650,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 2	5 2	002		Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Pokok dan RKA dan Perubahan yang Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun	2 dokumen RKA dan DPA Pokok dan 2 dokumen RKA dan DPA perubahan yang 1 dokumen renja 1 dokumen renstra 4 dokumen evaluasi renja	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	100,000,000.00	4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	150,000,000.00	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	200,000,000.00	4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	225,000,000.00	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	250,000,000.00	20 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 20 Dokumen	925,000,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 2	5 2	003		Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	kegiatan baru	0 Usulan Kegiatan	0.00	24 Usulan Kegiatan	75,000,000.00	24 Usulan Kegiatan	100,000,000.00	24 Usulan Kegiatan	110,000,000.00	24 Usulan Kegiatan	120,000,000.00	96 Usulan Kegiatan	405,000,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 2	5 2	004		Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang	kegiatan baru kegiatan baru	0 Laporan 0 Jenis	0.00	12 Laporan 3 Jenis	150,000,000.00	12 Laporan 3 Jenis	200,000,000.00	12 Laporan 3 Jenis	225,000,000.00	12 Laporan 3 Jenis	250,000,000.00	60 Laporan 15 Jenis	825,000,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 2	5 2	005		Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	kegiatan rutin	12 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	85,000,000.00	12 Laporan	86,000,000.00	12 Laporan	90,000,000.00	60 Laporan	421,000,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 2	5 2	006		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	kegiatan rutin	2 Laporan	60,000,000.00	2 Laporan	60,000,000.00	2 Laporan	65,000,000.00	2 Laporan	66,000,000.00	2 Laporan	70,000,000.00	10 Laporan	321,000,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 2	5 2	007		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang	kegiatan rutin	0 Laporan	0.00	12 Laporan	10,000,000.00	12 Laporan	10,000,000.00	12 Laporan	10,000,000.00	12 Laporan	10,000,000.00	60 Laporan	40,000,000.00	Dinas Perindustrian
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% ASN Nilai SKP kategori baik	0.00	00	53			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASTAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	46,000,000.00	100 %	136,000,000.00	100 %	136,000,000.00	100 %	136,000,000.00	100 %	136,000,000.00	100 %	590,000,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 3	5 3	001		Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	kegiatan rutin kegiatan rutin	0 Orang 0 Laporan	0.00	72 Orang 72 Laporan	15,000,000.00	72 Orang 72 Laporan	15,000,000.00	72 Orang 72 Laporan	15,000,000.00	72 Orang 72 Laporan	15,000,000.00	360 Orang 360 Laporan	60,000,000.00	Dinas Perindustrian
			0 . 0 0	0 0 3	5 3	002		Pengadaan Pakai Dinas dan Pakai KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakai Dinas dan Pakai KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	kegiatan rutin	0 Pasang	0.00	72 Pasang	50,000,000.00	72 Pasang	50,000,000.00	72 Pasang	50,000,000.00	72 Pasang	50,000,000.00	360 Pasang	200,000,000.00	Dinas Perindustrian

			0 . 0 0	0 0 3	003		Pengadaan Pakia Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu	Jumlah Pakia Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu yang tersedia	kegiatan rutin	72 Pasang	46,000,000.00	72 Pasang	46,000,000.00	72 Pasang	46,000,000.00	72 Pasang	46,000,000.00	360 Pasang	230,000,000.00	Dinas Perindustrian		
			0 . 0 0	0 0 3	008		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan	kegiatan baru	0 Orang	0.00	72 Orang	25,000,000.00	72 Orang	25,000,000.00	72 Orang	25,000,000.00	360 Orang	100,000,000.00	Dinas Perindustrian		
Mewujudkan iklim industri daerah yang konduif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru	Peningkatan jumlah Sentra industri dan kawasan industri	Jumlah Kawasan industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan jumlah sentra industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan jumlah sentra industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan	2.00	06	01		PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI (Prioritas)	Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya Jumlah kawasan pergudangan yang tertata % Peningkatan produksi industri potensial	6 Sentra 1 Kawasan 6%	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	508,800,000.00	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	7,350,000,000.00	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	7,600,000,000.00	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	8,025,000,000.00	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	8,715,000,000.00	10 Sentra 10 Kawasan 50 %	32,198,800,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	001		Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Rumput Laut	Jumlah sentra industri rumput laut yang dibentuk dan dibina	2 sentra	2 sentra	33,750,000.00	0 sentra	0.00	0 sentra	0.00	0 sentra	0.00	0 sentra	0.00	2 sentra	33,750,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	002		Pengembangan dan pembinaan sentra industri kakao	Jumlah sentra industri kakao yang dibentuk dan dibina	2 sentra	2 sentra	34,750,000.00	0 sentra	0.00	0 sentra	0.00	0 sentra	0.00	0 sentra	0.00	2 sentra	34,750,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	003		Pengembangan dan pembinaan sentra industri kopi	Jumlah sentra industri kopi yang dibentuk dan dibina	2 sentra	2 sentra	39,600,000.00	0 sentra	0.00	0 sentra	0.00	0 sentra	0.00	0 sentra	0.00	2 sentra	39,600,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	005		Pengembangan dan pembinaan sentra industri hasil hutan	Jumlah sentra industri hasil hutan yang dibentuk dan dibina	2 sentra	2 sentra	60,600,000.00	2 sentra	250,000,000.00	2 sentra	250,000,000.00	2 sentra	300,000,000.00	2 sentra	425,000,000.00	10 sentra	1,285,600,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	006		Pengembangan dan pembinaan sentra industri tekstil dan sutera	Jumlah sentra industri tekstil dan sutera yang dibentuk dan dibina	1 sentra	2 sentra	167,100,000.00	2 sentra	250,000,000.00	2 sentra	250,000,000.00	2 sentra	325,000,000.00	2 sentra	430,000,000.00	10 sentra	1,422,100,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	007		Pengembangan dan pembinaan sentra industri pande besi	Jumlah sentra industri pande besi yang dibentuk dan dibina	2 sentra	1 sentra	54,200,000.00	3 sentra	200,000,000.00	3 sentra	250,000,000.00	3 sentra	300,000,000.00	3 sentra	430,000,000.00	13 sentra	1,234,200,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	008		Pengembangan dan pembinaan sentra industri kapal rakyat	Jumlah sentra industri kapal rakyat yang dibentuk dan dibina	1 sentra	1 sentra	24,200,000.00	3 sentra	250,000,000.00	3 sentra	250,000,000.00	3 sentra	300,000,000.00	3 sentra	430,000,000.00	13 sentra	1,254,200,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	009		Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Agro	Jumlah sentra industri agro yang dibina dan dikembangkan	12 sentra	0 sentra	0.00	5 sentra	900,000,000.00	5 sentra	1,000,000,000.00	5 sentra	1,100,000,000.00	5 sentra	1,200,000,000.00	20 sentra	4,200,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	010		Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Kerajinan dan Aneka	Jumlah sentra industri kerajinan dan aneka yang dibina dan	1 sentra	0 sentra	0.00	3 sentra	500,000,000.00	3 sentra	600,000,000.00	3 sentra	700,000,000.00	3 sentra	800,000,000.00	12 sentra	2,600,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	014		pengembangan dan pembinaan sentra industri jagung	Jumlah sentra IKM jagung yang dibina dan dikembangkan	1 sentra	5 Sentra	94,600,000.00	0 Sentra	0.00	0 Sentra	0.00	0 Sentra	0.00	0 Sentra	0.00	5 Sentra	94,600,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 6 0	0 1	015		Penataan dan Pengembangan Kawasan Industri	Jumlah kawasan industri yang dibentuk dan dikembangkan Jumlah perizinan kawasan industri yang	1 kawasan kegiatan baru	0 kawasan 0 perizinan	0.00	1 kawasan 1 perizinan	5,000,000,000.00	1 kawasan 1 perizinan	5,000,000,000.00	1 kawasan 1 perizinan	5,000,000,000.00	1 kawasan 1 perizinan	5,000,000,000.00	4 kawasan 4 perizinan	20,000,000,000.00	Dinas Perindustrian
Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja di sektor industri	Peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor industri	Jumlah SDM industri yang dibina	2.00	06	02		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Jumlah produk industri yang memenuhi standar	6408 produk	4 Produk	1,581,485,000.00	4 Produk	3,400,000,000.00	4 Produk	3,450,000,000.00	4 Produk	3,460,000,000.00	4 Produk	3,050,000,000.00	20 Produk	14,941,485,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 2	001		Pembuatan prototype alat/ mesin pertanian	Jumlah prototype alat/ mesin pertanian yang dibuat	5 unit prototype	3 prototype	128,100,000.00	0 prototype	0.00	0 prototype	0.00	0 prototype	0.00	0 prototype	0.00	3 prototype	128,100,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 2	003		Sosialisasi/ demonstrasi alat/ mesin pertanian di kabupaten/ kota	Jumlah ikm yang mengikuti sosialisasi	12 kali	10 IKM	168,000,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	10 IKM	168,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 2	005		sinergitas industri alat transportasi, logam dan mesin ke pusat (kementerian perindustrian)	Jumlah sinergitas industri alat transportasi, logam dan mesin ke pusat	5 kali sinergitas pertahun	5 kali	43,665,000.00	0 kali	0.00	0 kali	0.00	0 kali	0.00	0 kali	0.00	5 kali	43,665,000.00	Dinas Perindustrian

			2 . 0 0	0 6 2	006		Penatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) makanan, minuman dan kemasan	jumlah pelayanan yang dilaksanakan pada UPT Mamin dan	48 pelayanan pertahun	48 pelayanan	137,000,000.00	48 pelayanan	1,000,000,000.00	48 pelayanan	1,000,000,000.00	48 pelayanan	1,000,000,000.00	48 pelayanan	500,000,000.00	240 pelayanan	3,637,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 2	007		Pengembangan Industri Makanan Minuman dan Kemasan Bernitro dengan pelaku usaha industri	jumlah pelaku usaha industri yang bermitra dengan UPT mamin dan kemasan	kegiatan baru	5 pelaku usaha industri	43,000,000.00	10 pelaku usaha industri	200,000,000.00	10 pelaku usaha industri	200,000,000.00	10 pelaku usaha industri	200,000,000.00	10 pelaku usaha industri	200,000,000.00	45 pelaku usaha industri	843,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 2	008		Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Makanan Minuman dan Kemasan	jumlah IKM yang dikembangkan dan dilayani di UPT mamin dan	kegiatan baru	5 IKM	240,400,000.00	10 IKM	350,000,000.00	10 IKM	350,000,000.00	10 IKM	350,000,000.00	10 IKM	350,000,000.00	45 IKM	1,640,400,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 2	009		Pengembangan industri kreatif berbasis komunitas	jumlah industri start up yang dibina dan akses inkubator bisnis oleh	1 inkubator bisnis	1 start up	54,920,000.00	10 start up	750,000,000.00	10 start up	775,000,000.00	10 start up	780,000,000.00	10 start up	825,000,000.00	41 start up	3,184,920,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 2	010		Pengembangan technopark berbasis IT	jumlah wirausaha IT baru yang dilatih	5 orang wirausaha baru bidang IT	20 orang	245,100,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	20 orang	245,100,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 2	012		Pembinaan standarisasi produk industri	Jumlah IKM yang Jumlah perizinan industri yang	Kegiatan Baru	5 IKM	106,400,000.00	25 IKM	500,000,000.00	25 IKM	500,000,000.00	25 IKM	500,000,000.00	25 IKM	500,000,000.00	105 IKM	2,106,400,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 2	017		Pengembangan SDM dan Produk Industri Fashion dan Garmen	Jumlah SDM dan Produk IKM fashion dan garmen yang dikembangkan	kegiatan baru	30 IKM	97,900,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	30 IKM	97,900,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 2	021		Pengembangan SDM dan produk industri Elektronika dan Telematika melalui sistem vokasional (magang)	jumlah IKM elektronika dan telematika yang dimagangkan	kegiatan baru	25 IKM	317,000,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	25 IKM	317,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 2	022		Pengembangan dan Pembinaan Industri Alat Mesin Pertanian	jumlah prototype alat mesin pertanian vane jumlah sosialisasi dan demonstrasi prototype alat	5 prototype	0 prototype	0.00	3 prototype	600,000,000.00	3 prototype	625,000,000.00	3 prototype	630,000,000.00	3 prototype	675,000,000.00	12 prototype	2,530,000,000.00	Dinas Perindustrian
Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri	Peningkatan kemampuan teknologi dan proses inovasi pada industri (innovation core)	Jumlah inovasi industri yang dikembangkan untuk hilirisasi industri Jumlah inovasi industri yang dikembangkan untuk hilirisasi industri	2.00	06	03		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Cakupan kelompok bina kelompok pengrajin % industri kecil dan menengah yang berkembang	10%	5 %	1,890,930,950.00	5 %	3,600,000,000.00	5 %	3,850,000,000.00	5 %	4,100,000,000.00	5 %	4,500,000,000.00	25 %	17,940,930,950.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	001		IKM Expo	Jumlah peserta IKM yang mengikuti IKM expo	kegiatan baru	24 IKM	900,350,000.00	24 IKM	1,200,000,000.00	24 IKM	1,250,000,000.00	24 IKM	1,300,000,000.00	24 IKM	1,500,000,000.00	120 IKM	6,150,350,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	007		Pembinaan dan Pengembangan industri Kimia Hilir	jumlah IKM kimia hilir yang dibina dan dikembangkan	20 IKM	5 IKM	31,445,950.00	10 IKM	350,000,000.00	10 IKM	350,000,000.00	10 IKM	350,000,000.00	10 IKM	350,000,000.00	45 IKM	1,431,445,950.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	008		Pembinaan dan pengembangan industri Hasil Hutan Kayu	jumlah IKM hasil hutan kayu yang dibina dan dikembangkan	10 IKM	10 IKM	67,100,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	10 IKM	67,100,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	009		Pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan bukan kayu	jumlah IKM hasil hutan bukan kayu yang dibina dan dikembangkan	kegiatan baru	10 IKM	169,310,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	10 IKM	169,310,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	012		Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional, nasional dan internasional Industri ITEA	jumlah IKM ITEA yang mengikuti gelar dan akses produk	kegiatan baru	0 IKM	0.00	5 IKM	350,000,000.00	5 IKM	375,000,000.00	5 IKM	400,000,000.00	5 IKM	425,000,000.00	25 IKM	1,550,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	014		Pameran produk ikm pada event daerah, Nasional dan Internasional	jumlah ikm yang produknya terpromosikan	1 pameran inacraft pertahun	3 IKM	253,025,000.00	5 IKM	350,000,000.00	5 IKM	350,000,000.00	5 IKM	350,000,000.00	5 IKM	350,000,000.00	25 IKM	1,653,025,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	015		Pembinaan dan Pengembangan industri kecil dan menengah	jumlah IKM yang dibina dan dikembangkan	kegiatan baru	6 IKM	53,500,000.00	10 IKM	150,000,000.00	10 IKM	200,000,000.00	10 IKM	250,000,000.00	10 IKM	300,000,000.00	46 IKM	953,500,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	016		pembinaan dan pembinaan kelompok pengrajin industri	jumlah kelompok pengrajin industri yang	1100 kelompok pengrajin	0 kelompok pengrajin	0.00	5 kelompok pengrajin	300,000,000.00	5 kelompok pengrajin	325,000,000.00	5 kelompok pengrajin	350,000,000.00	5 kelompok pengrajin	375,000,000.00	25 kelompok pengrajin	1,350,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	019		Identifikasi perkembangan IKM	jumlah data ikm yang dihasilkan setelah pengidentifikasi an	1 dokumen	0 paket data	0.00	1 paket data	100,000,000.00	1 paket data	150,000,000.00	1 paket data	200,000,000.00	1 paket data	250,000,000.00	5 paket data	700,000,000.00	Dinas Perindustrian

			2 . 0 0	0 6 3	026		Pelatihan penerapan GMP kimia hilir	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	20 IKM	20 IKM	209,000,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	20 IKM	209,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	029		Pembinaan dan Pengembangan Hilirisasi Hasil Pertanian	Jumlah IKM hasil pertanian yang dibina dan dikembangkan	kegiatan baru	5 IKM	103,600,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	5 IKM	103,600,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	030		Pembinaan dan pengembangan hilirisasi hasil peternakan	Jumlah IKM hasil peternakan yang dibina dan dikembangkan	kegiatan baru	5 IKM	103,600,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	5 IKM	103,600,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	033		Pembinaan dan pengembangan industri hilirisasi hasil pertambangan	Jumlah IKM hilirisasi hasil pertambangan yang dibina dan dikembangkan	kegiatan baru	0 IKM	0.00	3 IKM	200,000,000.00	3 IKM	250,000,000.00	3 IKM	300,000,000.00	3 IKM	350,000,000.00	15 IKM	1,100,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	034		Pembinaan dan pengembangan industri hilirisasi hasil agro (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan) yang dibina	Jumlah IKM hilirisasi hasil agro (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan) yang dibina	kegiatan baru	0 IKM	0.00	3 IKM	300,000,000.00	3 IKM	300,000,000.00	3 IKM	300,000,000.00	3 IKM	300,000,000.00	12 IKM	1,200,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 3	035		Pembinaan dan pengembangan industri hilirisasi hasil kehutanan	Jumlah IKM hilirisasi hasil kehutanan yang dibina	kegiatan baru	0 IKM	0.00	3 IKM	300,000,000.00	3 IKM	300,000,000.00	3 IKM	300,000,000.00	3 IKM	300,000,000.00	12 IKM	1,200,000,000.00	Dinas Perindustrian
Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah	Peningkatan jumlah industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/ kota	Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah	2.00	06	04		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi	265 Industri 0 unit	1 Industri 1 Unit	1,103,962,250.00	1 Industri 1 Unit	2,600,000,000.00 1 Unit	1 Industri 1 Unit	2,800,000,000.00 1 Unit	1 Industri 1 Unit	2,975,000,000.00 1 Unit	1 Industri 1 Unit	3,300,000,000.00 5 Unit	12,778,962,250.00 5 Unit	Dinas Perindustrian	
			2 . 0 0	0 6 4	002		Pembinaan kemampuan teknologi industri alat angkut	Jumlah IKM alat angkut yang dibina	20 IKM	20 IKM	72,150,000.00	50 IKM	200,000,000.00	50 IKM	250,000,000.00	50 IKM	300,000,000.00	50 IKM	350,000,000.00	220 IKM	1,172,150,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 4	003		Klinik Teknologi	Jumlah IKM yang mengakses klinik teknologi	kegiatan baru	12 IKM	67,300,000.00	25 IKM	150,000,000.00	25 IKM	200,000,000.00	25 IKM	300,000,000.00	25 IKM	400,000,000.00	112 IKM	1,117,300,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 4	004		Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Informatika	Jumlah IKM elektronika dan informatika yang dibina	20 IKM	20 IKM	132,262,250.00	20 IKM	150,000,000.00	20 IKM	150,000,000.00	20 IKM	150,000,000.00	20 IKM	150,000,000.00	100 IKM	732,262,250.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 4	006		Pelatihan peningkatan mutu dan diversifikasi produk kerajinan bagi IKM	Jumlah ikm kerajinan yang dilatih	20 IKM	20 IKM	575,000,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	20 IKM	575,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 4	007		Pelayanan administrasi perkantoran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) logam, asintan dan tekstil	Jumlah UPTD Logam, tekstil dan asintan yang dilayani administrasi perkantorannya	3 UPTD	3 UPTD	102,500,000.00	3 UPTD	300,000,000.00	3 UPTD	300,000,000.00	3 UPTD	300,000,000.00	3 UPTD	300,000,000.00	15 UPTD	1,302,500,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 4	008		Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) logam dan asintan	Jumlah IKM yang dilayani di UPTD Logam	3 akses pelayanan	10 IKM	90,000,000.00	20 IKM	750,000,000.00	20 IKM	775,000,000.00	20 IKM	775,000,000.00	20 IKM	825,000,000.00	90 IKM	3,215,000,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 4	009		Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tekstil	Jumlah IKM yang dilayani di UPTD Tekstil	3 akses pelayanan	5 IKM	64,750,000.00	25 IKM	900,000,000.00	25 IKM	925,000,000.00	25 IKM	900,000,000.00	25 IKM	975,000,000.00	105 IKM	3,764,750,000.00	Dinas Perindustrian
			2 . 0 0	0 6 4	011		Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Jumlah IKM tekstil dan sutera yang dibina	25 IKM	0 IKM	0.00	25 IKM	150,000,000.00	25 IKM	200,000,000.00	25 IKM	250,000,000.00	25 IKM	300,000,000.00	125 IKM	900,000,000.00	Dinas Perindustrian
Grandtotal									9,905,521,350.00		22,925,714,982.84		24,295,946,418.91		25,429,996,056.43		26,795,988,700.88		109,353,167,509.06			

Table T-C.28
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah % ASN Nilai SKP kategori baik Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan(1)</i>	B	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	AA
2	Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru(1)</i>	5.61 29,202,608.04 (Rp Milyar)	1000 IKM	1000 IKM	1000 IKM	1000 IKM	1000 IKM	4.37 % 41,166,380.41 Milyar Rp

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	jumlah sentra industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan Jumlah Kawasan industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan Sasaran RPJMD Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru(1)	5.61 29,202,608.04 (Rp Milyar)	3 sentra 1 kawasan	3 sentra 1 kawasan	3 sentra 1 kawasan	3 sentra 1 kawasan	3 sentra 1 kawasan	4.37 % 41,166,380.41 Milyar Rp
4	jumlah SDM industri yang dibina Sasaran RPJMD Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat(1)	63.39	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	68.5
5	Jumlah inovasi industri yang dikembangkan untuk hilirisasi industri Sasaran RPJMD Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam (1)	75,782,133	6 Inovasi	6 Inovasi	6 Inovasi	6 Inovasi	6 Inovasi	93,325,387 Rp / Angkatan Kerja